

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

MEGANDAL
SKANDAL

PERBANKKAN

BLBI

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Bailout Bank Century
Rekening 502

Perhimpunan
Pusat Studi Hukum Publik
2018

W

Mega Skandal Perbankan

Penulis:

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Penerbit : Perhimpunan PSHP

Alamat : Jl. Pedati Raya No. 6 Jakarta Timur.

Email : kajipublik@yahoo.co.id

Cet. I : Jakarta, Desember 2018

(ix + 320 halaman, 14x21)

ISBN : 978-6025-1148-6-1

ISBN 978-602-51148-6-1



KATA PENGANTAR

Penelitian ini dikerjakan sebagai upaya menggali persoalan besar di bidang perbankan nasional, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Rekening 503, dan *bailout* Bank Century. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan besar, yaitu bagaimana mata rantai pertanggung-jawaban dari masalah ini. Pertanyaan itu layak diajukan, karena untuk menentukan kesalahan dalam kebijakan public pastilah terkait dengan mata rantai pihak-pihak yang harus dapat dimintakan pertanggung-jawabannya.

Tidak salah kalau mengatakan persoalan likuidasi bank ini lebih fokus pada aspek pertanggung jawaban operasional perbankan, yang harus dipikul secara tidak proporsional oleh jajaran BI. Karena likuidasi bank lahir sebagai kebijakan pemerintahan.

Sebagai upaya membongkar mega-skandal perbankan dalam kaitan dengan penyalahgunaan bantuan likuidasi, maka semua pihak terkait harus diperiksa secara sederajat di muka hukum. Pihak kejaksaan telah bekerja untuk memproses persoalan ini, tetapi proses pemeriksaan tampaknya berhenti bermuara pada BI. Buku ini memberikan jawaban bahwa muara pemeriksaan tidak boleh berhenti pada jajaran BI.

Sebagai suatu hasil penelitian, buku terus dilakukan perbaikan, walaupun masih dapat diperdebatkan tentang substansi laporan maupun metodologi penelitiannya. Karena itu, kritik dan saran akan disambut terbuka oleh penulis. Selamat membaca.

Jakarta, 10 November 2018

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI-*Bank Indonesia Liquidity Support*), Rekening 502, *bail out Bank Century* merupakan kasus perbankan yang terus menjadi kontroversi. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan besar, yaitu apa yang melatarbelakangi dan landasan hukum kebijakan BLBI, Rekening 502, dan *bailout bank century*, serta bagaimana implementasiannya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Kasus BLBI dan Rekening 502 muncul sebagai dampak dari krisis ekonomi global yang juga melanda Indonesia yang muncul pada tahun 1997. Sementara itu kasus *bailout* Bank Century muncul sebagai akibat dari krisis ekonomi global pada tahun 2007 yang juga berimbas pada ekonomi Indonesia. Kebijakan diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlu memilah antara level pengambilan kebijakan dan level pelaksana kebijakan. Meski demikian kedua level tersebut tetap harus dikaji secara mendalam berkaitan dengan ada tidaknya unsur penyalagunaan wewenang dan indikasi korupsi. Konsistensi penegakan hukum menjadi penting untuk mengungkap mega skandal perbankan.

ABSTRACT

BLBI-Bantuan likuidasi Bank Indonesia/Bank Indonesia Liquidity Support, Rekening - 502, Century Bank are banking cases that continues to be controversial. This study aims to answer the big questions, namely what is the background and the legal basis of BLBI policy, 502 account, and century bank bailout, and how they are implemented. The study was conducted using a normative legal method.

The BLBI and Rekening 502 cases emerged as a result of the global economic crisis which also hit Indonesia that emerged in 1997. Meanwhile, the Bank Century bailout case emerged as a result of the global economic crisis in 2007 which also affected the Indonesian economy. Policies are taken based on laws and regulations. It is necessary to sort between the level of policy making and the level of policy enforcer. However, both of these levels must still be studied in depth with regard to whether there is an element of abuse of power and indications of corruption. The consistency of law enforcement is important to uncover banking mega scandals

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	3
B. Rumusahan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Metode Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15

BAB II : TINJAUAN TENTANG BI DAN KRISIS EKONOMI

A. Kedudukan Bank Indonesia	19
1. BI pada Masa UUD 1945	19
2. BI pada Masa UUD NRI Tahun 1945	25
B. Krisis Ekonomi	35
1. BLBI dan Krisis Ekonomi	35
2. Rekening 502 dan Krisis Ekonomi ...	59
3. Krisis Global dan Bank Gagal Berdampak Sistemik	67

BAB III: KASUS BLBI

A. Latar Belakang Munculnya BLBI	73
B. Istilah BLBI	82
C. BLBI: Perspektif Hukum	89
D. Wacana Publik Mengenai BLBI	95
E. Dimensi-Dimensi BLBI	104
F. Mencari Format Penyelesaian Kemelut BLBI	119
G. Solusi Keluar dari Kemelut BLBI	130
H. Perkembangan Penyelesaian Kasus BLBI	134

BAB IV : REKENING 502

A. Latar Belakang Munculnya Kasus Rekening 502	147
B. Kebijakan Rekening 502	150
C. Laporan BPK dan Jawaban BI tentang Rekening 502	160
D. Aspek Hukum Administrasi Negara Rekening 502	183
E. Aspek Hukum Pidana Rekening 502 Dimensi-dimensi BLBI	202

BAB V : BAILOUT BANK CENTURY

A. Jejak Bank Century	221
B. Krisis Ekonomi Global dan kebijakan Bailout Bank Century	230

C. Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Krisis Ekonomi	233
D. Bank Century sebagai <i>Bank Gagal yang Berdampak Sistemik</i>	243
E. Laporan Hasil Audit BPK	256
1. Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk 2009.....	256
2. Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas Kasus PT. Bank Century Tahun 2011.	260
F. Penyelesaian Kasus Bank Century	264
1. Penyelesaian Politik	264
2. Proses Hukum	273
BAB VI : PENUTUP	279

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

DAFTAR PUSTAKA

Andi Muhammad Asrun dan A. Ahsin T. "BLBI, Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi." Jakarta: Judicial Watch Indonesia. 2004

— "BLBI, Perspektif Hukum, dan Ekonomi." Jakarta: PSKP. 2018.

— "Rekening 502." Jakarta: PSKP. 2015.

Andrews, Collin Mac. *Central Government and Local Government*. Oxford: Oxford University Press, 1986.

Annual Report Tahun 2008 Bank Century (Bank Mutiara)

Ari Wahyudi Hertanto, "Master Settlement And Acquisition Agreement/MSAA) dan Master Refinancing and Notes Issuance Agreement/MRNI dalam Perspektif hukum Perdat", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-35 No.4 Oktober-Desember 2005, Hlm 434 - 455.

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Adrnistrasi Negara*. Cet. VII, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1984.

Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta: Humas BI, 2010.

Bank Indonesia. *Mengurai Benang Kusut BLBI*. Cet. I, Jakarta: Bank Indonesia, 2002.

Bank Indonesia.. *Menguak Proses Pembebanan Rekening 502*. Jakarta: Bank Indonesia, 2003.

Bank Indoneisa, Siaran Pers Penjelasan Pjs.Gubernur Bank Indonesia, disampaikan

dalam *Press Conference* bersama Departemen Keuangan, BI, & LPS Mengenai Hasil Audit Investigasi BPK di Departemen Keuangan, Jakarta, 24 November 2009.

BAPENAS, *Krisis Keuangan Eropa: Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia - Tinjauan Ekonomi Triwulanan Bappenas*, 2011.

Biro Humas Dan Luar Negeri BPK, Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan, "BPK RI Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas Kasus PT Bank Century, Tbk." Jakarta, Jumat (23 Desember 2011).

Biro Humas Dan Luar Negeri BPK, Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan: "BPK Menyampaikan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian FPJP Kepada PT Bank Century, Tbk dan Proses Penetapan PT Bank Century, Tbk Sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik kepada KPK", Jakarta, Senin, 23 Desember 2013.

BPK, *Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Atas Kasus PT Bank Century Tbk*, 2009

BPK, Siaran Pers BPK-RI Tentang Hasil Audit Investigasi Atas Penyaluran Dan Penggunaan Blbi, Jakarta, 4 Agustus 2000

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992

Center for Financial Policy Studies. *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia: Suatu Pelajaran yang Sangat Mahal*

bagi Otoritas Moneter dan Perbankan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.

Depkeu Republik Indonesia, Buku Putih, Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis, Edisi Januari 2010,

Eko B Supriyanto , " Menyelesaikan Skandal BLBI", Artikel dimuat pada *Harian Kompas*, 27 Juni 2018.

Emerson Yuntho, "Quo Vadis" Skandal Korupsi BLBI", Artikel dimuat pada *Harian Kompas*, 5 Juni 2018

Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja •, 1999

Hadjon, Philipus M.. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. cet. III. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Anciant and Modern*, Sixth Edition, (St. Paul, Minn., 1991.

Hoessein, Bhenyamin. "Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan sebagai Tanggap terhadap Aspirasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi", *Jurnal Usahawan*, No. 04, Tahun XXIX, April 2000.

Hukumonline.com

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596dc25e7fad6/kebijakan-dana-talangan-bank->

century--diskresi-yang-dapat-diuji diakses 30 November 2018.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596dc25e7fad6/kebijakan-dana-talangan-bank-century--diskresi-yang-dapat-diuji> diakses 30 November 2018.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, 2000.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jilid II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

KHN, Newsletter KHN, November 2013.

Kompas.com "Inilah Lima Poin Fokus Penyelidikan Angket Century", <https://nasional.kompas.com/read/2009/12/01/18483825/Inilah.Lima.Poin.Fokus.Penyelidikan.Angket.Century>.

Kwik Kiangie, *Interpelasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Blbi) Kepada SBY Salah Alamat*, artikel pada <http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/interpelasi-bantuan-likuiditas-bank-indonesia-blbi-kepada-sby-salah-alamat-artikel-1/> diakses 14 November 2017.

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-YLBHI, 1988.

Nugraha, Safri. "*Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Pelaksanaan Keputusan Pejabat Badan Hukum Publik: Telaah Akademis atas Rekening 502*". Makalah disampaikan dalam Diskusi Rekening 502 di Hotel Milenium, diselenggarakan Judicial Watch Indonesia, tanggal 29 Maret 2004.

Nur Hidayat, et. al. "*Dana Mengucur Salah P•osedur*", *Majalah Gatra*, 24 Januari 2004. Nur Hidayat. "*Banyak Tagihan Kantong Kempis*", *Majalah Gatra*, 24 Januari 2004.

Oey Hoey Tiong, "Master Settlement and Acquisition Agreement, Makalah disampaikan pada lokakarya Tinjauan Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan UU Bank Indonesia di Bogor pada 27-28 Februari 2002. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4971/master-settlement-and-acquisition-and-agreement-i>, Diakses pada 14 November 2018,

Oey Hoey Tiong, "Master Settlement and Acquisition Agreement, Makalah disampaikan pada lokakarya Tinjauan Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan UU Bank Indonesia di Bogor pada 27-28 Februari 2002. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/h>

- 014971/master-settlement-and-acquisition-and-agreement-i, Diakses pada 14 November 2018,
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Rijanto, "Problema BLBI", artikel dalam *Harian Suara Karya*, Edisi 4 Juni 2002.
- Ryan Kiryanto. "Menyoal Kontroversi Rekening 502", dalam *Harian Pikiran Rakyat*, Senin, 22 September 2003.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D., *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Soedradjad Djiwandono, "BLBI Lahir dan Berkembang pada Era Multidimensi", *Harian Kompas*, edisi 22 November 2000.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1995.
- Sukowaluyo Mintorahardjo, *BLBI Simalakama: Pertaruhan Kekuasaan Presiden Soeharto*, Cet. I,

Jakarta: RESI-Riset Ekonomi Sosial Indonesia,
2001

Tempointeraktif.com

<http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/03/03/brk,20100303-229826,id.html>

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011

_____, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2002.

_____, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2002.

_____, *Undang-Undang tentang Bank Sentral*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, LN RI Nomor 63 Tahun 1968 TLN RI Nomor 2865

_____, *Undang-Undang tentang Bank Sentral*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, LN RI Nomor 63 Tahun 1968 TLN RI Nomor 2865

_____, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum*. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 29. .